



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

Nomor : W13.U1/801/HK.00/XII/2024 Yogyakarta, 17 Desember 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengadaan Jasa Konsultan Layanan Pos Bantuan Hukum di
Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun anggaran 2025

Kepada Yth.
Calon Penyedia Jasa Konsultasi Posbakum
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Di -

YOGYAKARTA

Dengan ini Saudara kami Undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung secara elektronik pada paket Pengadaan Jasa Konsultasi sebagai berikut:

A. PAKET PENGADAAN

Nama Paket : Pengadaan Jasa Konsultan Layanan Pos Bantuan
Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta
Lokasi Pengadaan : Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nilai HPS : Rp 44.000.000,00 (*empat puluh empat juta rupiah*)
Sumber Dana : SP DIPA 005.03.2.099128/2024 tanggal 2
Desember 2024_Ditjen Badilum Mahkamah Agung
Jangka Waktu : 1 (satu) tahun

B. FORMASI PENERIMAAN

1. Pemberi Jasa pada Pos Pelayanan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan Tinggi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
2. Pemberi jasa pos pelayanan Hukum adalah Advokat dan Sarjana Hukum;
3. Pemberian jasa yang akan bertugas pada Pos Pelayanan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

C. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Syarat Administrasi penyedia Pos Bantuan Hukum dari Organisasi bantuan hukum pada organisasi Profesi Advokat, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) adalah:

1. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
2. Memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia;
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai bidang usaha (badan/lembaga);
4. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan melampirkan keterangan Domisili Lembaga dari Kelurahan;
5. Memiliki NPWP dan Rekening atas nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum;
6. Melampirkan pelaporan pajak lembaga tahun terakhir;
7. Surat Pernyataan Pakta integritas yang berisi:
 - a) Tidak akan melakukan komuniaksi yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN);
 - b) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN);
 - c) Melaporkan kepada APIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - d) Mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf (a), (b), (c) dan/atau (d) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta berisi:
 - a) Peserta yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
 - b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi daftar hitam;
 - d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e) Peserta yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
9. Surat Penawaran yang ditandatangani Peserta.

D. PERSYARATAN TEKNIS

1. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan atau beracara di Pengadilan atau memahami mekanisme Layanan Posbakum Pengadilan Negeri;
2. Memiliki minimal 1 orang Advokat yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan, dengan melampirkan KTP, Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku, dan Berita Acara Penyempahan Advokat;
3. Memiliki minimal 2 orang Staff atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bergelar minimal Sarjana Hukum.
4. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus telah menempuh 140 SKS dan telah lulus mata kuliah Hukum acara serta Pratek Hukum Acara, Wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) aktif dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat.

E. PROSES SELEKSI

1. Calon Penyedia Jasa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan Teknis dinyatakan gugur dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
2. Hasil keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

F. PELAKSANAAN PENGADAAN

Tempat : Pengadilan Negeri Yogyakarta
Alamat : Jln. Kapas No. 10 Yogyakarta, D. I. Yogyakarta
Telephone/Fax : 0882 9721 8177 / (0274) 586563
Website : <https://pn-yogyakota.go.id/pnyk/>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung pada aplikasi SPSE : <https://lpse.mahkamahagung.go.id/> sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
a.	Undangan dan Pengumuman	17-12-2024 08:00	18-12-2024 15:00
b.	Upload Dokumen Penawaran	18-12-2024 15:01	20-12-2024 12:00
c.	Pembukaan Dokumen Penawaran	20-12-2024 12:01	24-12-2024 23:59
d.	Evaluasi Penawaran	23-12-2024 00:00	24-12-2024 23:59

e.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	27-12-2024 00:00	27-12-2024 23:59
f.	Penandatanganan Kontrak	02-01-2025 00:00	02-01-2025 23:59

Pemasukan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan diatas meliputi kelengkapan Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Harga dengan masa berlaku penawaran paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran,

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai dengan alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



Yenny Viky Effendy

Yogyakarta 17 Desember 2024
Ketua Panitia Seleksi



Purnomo Wibowo